

**PENGARUH KEPEMILIKAN SAHAM PEMERINTAH, TIPE INDUSTRI,
UKURAN PERUSAHAAN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP
PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DI INDONESIA**

(Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar di BEI tahun 2008-2012)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



**OLEH :
NIKE MEILISSA ZULFI**

**NIM :
56343/2010**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH KEPEMILIKAN SAHAM PEMERINTAH, TIPE INDUSTRI,
UKURAN PERUSAHAAN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP
PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
PADA PERUSAHAAN *GO PUBLIC* DI INDONESIA

Nama : NIKE MEILISSA ZULFI
TM/NIM : 2010/56343
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Manajemen
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2014

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710522 200003 2 001



Henri Agustin, SE, M. Sc, Ak
NIP. 19771123 200312 1 003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh Kepemilikan Saham Pemerintah, Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan *Go public* di Indonesia (*Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012*)

Nama : Nike Meilissa Zulfi

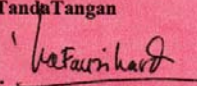
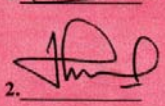
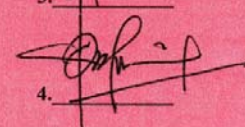
TM/NIM : 2010/56343

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2014

Tim Penguji

No. Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak	1. 
2. Sekretaris	: Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	2. 
3. Anggota	: Mayar Afriyenti, SE, M.Sc	3. 
4. Anggota	: Halmawati, SE, M.Si	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nike Meilissa Zulfi
NIM/Tahun Masuk : 56343/2010
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/ 2 Mei 1992
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Manajemen
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Komp. Griya Madani Blok H/1 Gunung Pangilun.
No. HP/Telp : 0852-72803-385
Judul Skripsi : Pengaruh Kepemilikan Saham Pemerintah, Tipe Industri, Ukuran perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan **Go Public** di Indonesia (*Studi empiris perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008-2012*)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis ini sah apabila telah ditandatangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Prodi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Agustus 2014
Yang Menyatakan,



Nike Meilissa Zulfi
56343/2010

ABSTRAK

Nike Meilissa Zulfi . 2010/56343. Pengaruh Kepemilikan Saham Pemerintah, Tipe Industri, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan Go Public di Indonesia.

Pembimbing 1 : Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak

2 : Henri Agustin, SE, M.sc.Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bukti empiris sejauhmana: 1) Pengaruh kepemilikan saham pemerintah terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, 2) Pengaruh tipe industri terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, 3) Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, 4) Pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian kausatif. Populasi penelitian ini adalah perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2012. Pemilihan sampel dengan metode *purposive sampling* dan sampel yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 26 perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dan uji t .

Hasil pengujian menunjukkan bahwa: 1) Kepemilikan Saham Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial $0,604 > \alpha 0,05$ $t_{hitung} 0,521 < t_{tabel} 1,979$ koefisien β dari variabel ini bernilai positif yaitu 0,028 (H_1 ditolak). 2) Tipe industri berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial $0,010 < \alpha 0,05$ dan $t_{hitung} 2,601 > t_{tabel} 1,979$. nilai β sebesar 0,059 menunjukkan arah positif. (H_2 diterima). 3) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dengan $0,589 > \alpha 0,05$ dan $t_{hitung} 0,541 < t_{tabel} 1,979$. koefisien β dari variabel ini bernilai positif yaitu 0,006 (H_3 ditolak). 4) Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial $0,006 < \alpha 0,05$ dan $t_{hitung} 2,811 > t_{tabel} 1,979$. Nilai koefisien β dari variabel ini bernilai positif yaitu 0,497 (H_4 diterima).

Saran penelitian ini: 1) Bagi peneliti selanjutnya hendaklah mempertimbangkan variabel independen lain yang berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 2) Pemerintah harus menetapkan regulasi secara tegas dan jelas mengenai praktik dan pengungkapan, serta pengawasan tanggung jawab sosial pada perusahaan di Indonesia.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kepemilikan Saham Pemerintah, Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan *Go Public* di Indonesia”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Namun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak dan Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan pemikirannya dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
4. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan agar penulis dapat mencapai apa yang dicita-citakan.
5. Teman-teman Prodi Akuntansi angkatan 2010 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan Prodi Ekonomi Pembangunan, Manajemen, dan Pendidikan Ekonomi yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran, serta dukungan yang sangat berguna dalam penulisan ini.
6. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Agustus 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
 BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	11
B. Konsep Pengungkapan Taanggung Jawab Sosial	
1. Definisi Tanggung Jawab Sosial	14
2. Pengungkapan CSR dalam laporan Tahunan di Indonesia	15
3. Manfaat Tanggung Jawab Sosial	18
4. Penilaian Corporate Social Responsibility.....	20
5. Kepemilikan Saham Pemerintah.....	25
6. Tipe Industri.....	26
7. Ukuran Perusahaan	27

8. Profitabilitas	29
C. Hasil Penelitian Terdahulu yang relevan	30
D. Pengembangan Hipotesis	32
E. Kerangka Konseptual	39

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	41
B. Populasi dan Sampel.....	41
C. Jenis Data dan Sumber Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Variabel Penelitian	45
F. Pengukuran Variabel	45
G. Uji Asumsi Klasik	48
H. Teknik Analisis Data	50
I. Defenisi Operasional	53

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	58
B. Deskriptif Variabel Penelitian	62
C. Analisis Data.....	73
1. Statistik Deskriptif.....	73
2. Uji Asumsi klasik.....	75
3. Hasil Uji Hipotesis.....	81
D. Pembahasan.....	86

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Keterbatasan Penelitian	99
C. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA	
.....	101
.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Item Pengungkapan.....	21
Tabel 2 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3 Kriteria Pengambilan Sampel.....	43
Tabel 4 Daftar Sampel Perusahaan.....	43
Tabel 5 Klasifikasi Nilai d.....	51
Tabel 6 Data Indeks Pengungkapan CSR Tahun 2008-201.....	64
Tabel 7 Data Kepemilikan Saham Pemerintah Tahun 2008-2012.....	66
Tabel 8 Data Variabel Dummy Tahun 2008-2012.....	68
Tabel 9 Data <i>Log Total Asset</i>	70
Tabel 10 Data ROA.....	72
Tabel 11 Hasil data <i>descriptive statistics</i>	74
Tabel 13 Uji normalitas residual.....	76
Tabel 14 Uji multikolonearitas.....	80
Tabel 15 Uji heterokedastisitas.....	80
Tabel 16 Uji autokorelasi.....	81
Tabel 17 Hasil uji F statistik.....	82
Tabel 18 Koefisien determinasi.....	83
Tabel 19 Regresi Berganda.....	83

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Konseptual.....	40
-----------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Perusahaan Sampel	106
2. Indeks Pengungkapan CSR.....	107
3. Tingkat kepemilikan saham pemerintah	108
4. Tipe industri Perusahaan.....	109
5. Tingkat ukuran Perusahaan.....	110
6. Tingkat Profitabilitas.....	111
7. Hasil Pengolahan Data Statistik dengan Program SPSS.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud mendapatkan laba (Griffin, 2006:4). Dampak dari kegiatan yang dilakukan tidak hanya dirasakan oleh perusahaan sendiri. Aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang bertentangan dengan masyarakat akan mempengaruhi eksistensi perusahaan. Perusahaan yang berdiri secara besar-besaran tanpa memperhatikan dampaknya membuat masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi atas lingkungan, sehingga masyarakat menuntut perusahaan tidak hanya memperhatikan aspek keuangan, melainkan setiap perusahaan berusaha membangun citra yang baik di masyarakat dengan memberikan perhatiannya kepada lingkungan dan sosial, yang lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri kini telah menjadi suatu trend di tingkat regional maupun internasional dan telah menjadi bagian yang sangat penting dalam bisnis. Semua perusahaan yang ingin tetap eksis/ berkelanjutan dan akseptabel serta memiliki keunggulan kompetitif harus menjadikan pertanggungjawaban sosial perusahaan sebagai bagian dari strategi bisnisnya.

Menurut Darwin dalam Anggraini (2006), *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* adalah mekanisme bagi suatu organisasi yang mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasi dan interaksinya

dengan stakeholders, yang melebihi tanggung jawab organisasi dibidang hukum. Sementara menurut Yusuf (2007:52) *Corporate Social Responsibility* merupakan konsep ketika perusahaan memutuskan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan lebih baik dan lingkungan yang lebih lestari.

Kegiatan tanggung jawab sosial awalnya merupakan kegiatan yang sifatnya sukarela. Namun pada September 2007 pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan mulai diwajibkan melalui UU Perseroan Terbatas No.40 Pasal 74 tahun 2007 dinyatakan bahwa perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha yang berhubungan dengan sumber daya alam melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pada pasal 66 ayat 2c UU No. 40 Tahun 2007, menyatakan bahwa semua perseroan wajib untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan. Pengungkapan informasi pelaksanaan kegiatan CSR telah dianjurkan dalam PSAK No. 1 tahun 2009 tentang Penyajian Laporan Keuangan bagian tanggung jawab atas Laporan Keuangan paragraf 09.

Pada prinsipnya CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) merupakan suatu komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, dan lingkungan kepada masyarakat, lingkungan, serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Tanggung jawab tersebut meliputi mencegah dampak negatif yang ditimbulkan perusahaan terhadap pihak lain dan lingkungan serta meningkatkan kualitas masyarakat termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, dan lingkungan sekitar perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan harus menyelaraskan pencapaian kinerja ekonomi (profit) dengan kinerja sosial

(people) dan kinerja lingkungan (*planet*) atau disebut *triple bottom-line performance*. Penyelarasan kinerja tersebut pada akhirnya akan membuat perusahaan mampu meraup berkah berlimpah atau keuntungan yang menjanjikan.

Dalam pedoman penyusunan *CSR* yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative (GRI)*, yang telah dikembangkan sejak tahun 1990 dan disusun tersendiri terpisah dari laporan keuangan atau laporan tahunan. Maka disediakan seperangkat indikator untuk menilai kinerja keberlanjutan perusahaan, yaitu: 9 indikator kinerja ekonomi, 30 indikator kinerja lingkungan, dan 40 indikator kinerja sosial. Saat ini, penyusunan dan pengungkapan *GRI* penting dilakukan sebagai salah satu upaya perusahaan untuk membuktikan akuntabilitas pelaksanaan tanggung jawabnya telah dilakukan secara benar dan terukur.

Praktik pengungkapan *CSR* telah banyak diterapkan oleh perusahaan publik di Indonesia. Pada laporan tahunannya, perusahaan telah menyebutkan aspek pertanggungjawaban sosial walaupun dalam bentuk yang relatif sederhana. Meskipun informasi mengenai *CSR* yang diungkap dalam laporan tahunan tersebut belum mendetail, namun itikad baik perusahaan ini perlu untuk mendapatkan apresiasi, setidaknya perusahaan telah menyadari pentingnya informasi yang terkait dengan *CSR*.

Mekanisme eksternal dalam pengawasan *corporate governance* merupakan cara mempengaruhi perusahaan salah satunya dengan kepemilikan pemerintah. Kepemilikan saham pemerintah adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Melalui kepemilikan saham ini pemerintah berhak menetapkan direktur perusahaan. Selain itu pemerintah dapat mengendalikan kebijakan yang diambil oleh manajemen agar sesuai dengan kepentingan/ aspirasi

pemerintah. Dengan adanya tekanan dan sorotan masyarakat akan membuat pemerintah lebih transparan dalam pengelolaannya (Lovink Angel, 2013).

Di Indonesia perusahaan ini disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah sehingga *stakeholder* utama perusahaan ini adalah pemerintah. Dalam menjalankan operasional perusahaannya, BUMN berpedoman kepada perundang-undangan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu BUMN akan mendapatkan sorotan yang lebih oleh masyarakat, hal ini karena masyarakat memiliki ekspektasi yang lebih besar terhadap BUMN dari pada perusahaan swasta. Bagi masyarakat, pengelolaan BUMN yang baik mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam berbisnis dan dalam pelaksanaan *good corporate governance*.

Salah satu perbedaan karakteristik yang menjadi perhatian adalah tipe industri, Robert (1992) menyatakan ada 2 tipe industri yaitu industri yang *high-profile* dan industri yang *low-profile*. Untuk membedakan kedua jenis industri tersebut. Robert (1992) dalam Hackston and Milne (1996) mendefinisikan *high-profile companies* sebagai perusahaan yang memiliki *consumer visibility*, tingkat risiko politik dan tingkat kompetisi yang tinggi. Industri yang *high-profile* diyakini melakukan pengungkapan sosial yang lebih banyak daripada industri yang *low-profile*. Dalam artian perusahaan yang berorientasi pada konsumen diperkirakan akan memberikan informasi mengenai pertanggungjawaban sosial karena hal ini akan meningkatkan *image* perusahaan dan mempengaruhi penjualan.

Pengungkapan tanggung jawab sosial juga dipengaruhi oleh faktor ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan, yaitu: skala yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti. Pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut pernyataan yang dilakukan oleh Sembiring (2005), secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan, dan perusahaan yang lebih besar dengan aktivitas operasi dan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat mungkin akan memiliki pemegang saham yang memperhatikan program sosial yang dibuat perusahaan, sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin luas. Dari sisi tenaga kerja, dengan semakin banyaknya jumlah tenaga kerja dalam suatu perusahaan, maka tekanan pada pihak manajemen untuk memperhatikan kepentingan tenaga kerja akan semakin besar. Program berkaitan dengan tenaga kerja yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, akan semakin banyak dilakukan oleh perusahaan. Hal ini berarti program tanggung jawab sosial perusahaan juga semakin banyak dan akan diungkapkan dalam laporan tahunan.

Profitabilitas memiliki keterkaitan erat dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk melakukan respon terhadap tekanan sosial sangat berhubungan erat dengan kesehatan keuangan perusahaan. Demikian juga jika perusahaan terlibat dalam kegiatan CSR sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan tersebut. Perusahaan yang tidak

mendapatkan aliran dana masuk yang cukup dari penghasilan perusahaan tidak akan memiliki modal yang memadai untuk melaksanakan aktivitas CSR.

Secara teoritis, menurut Kokubu et.al (2001) dalam Sembiring (2005) terdapat hubungan positif antara kinerja ekonomi suatu perusahaan dengan pengungkapan CSR. Hal ini dikaitkan dengan teori agensi bahwa peolehan laba yang semakin besar akan membuat perusahaan mengungkapkan informasi sosial yang lebih luas.

Fenomena yang terkait dengan berkembangnya isu CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) baik ditingkat global maupun di Indonesia dipicu oleh banyaknya kasus yang terjadi di dalam komunitas bisnis. Di luar negeri: kasus Nike, yaitu perusahaan produsen perlengkapan dan alat-alat olahraga (berpusat di Amerika) yang tersandung masalah CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) di tahun 1996. Perusahaan tersebut dituduh telah mengabaikan etika bisnis korporasi diantaranya dengan memeras buruh di negara berkembang (Hasibuan dan Sedyono, 2006).

Di Indonesia sendiri telah terjadi beberapa fenomena serupa, Pada tahun 2009 PT Trubaindo Coal Mining menghadapi ancaman penghentian aktivitas perusahaan oleh warga sekitar. Hal ini terjadi karena perusahaan belum menepati janjinya untuk melunasi ganti rugi lahan warga Bentian Besar Kalimantan Timur dan membangun instalasi air bersih. Ancaman juga terjadi karena ganti rugi yang diberikan hanya sebesar Rp 10 juta per hektar, namun dalam laporan berkelanjutan PT Trubaindo mengakui ganti rugi dibayarkan Rp 40 juta per hektar, dimana Rp 30 juta diantaranya diberikan kepada kelompok pemerintah (www.csrindonesia.com). Pada tanggal 26 Januari 2012 yang lalu, LSM Merah

Putih dan Cagar Tuban melakukan unjuk rasa ke kantor PT Holcim di Jl. Basuki Rahmad Kabupaten Tuban untuk menolak rencana pembangunan pabrik yang dikhawatirkan dapat menambah daftar kerusakan yang terjadi di wilayah Tuban (www.beritajatim.com). Terjadinya kasus-kasus yang berkaitan dengan lingkungan yang diuraikan diatas semakin memperjelas kebutuhan pelaksanaan dan pengungkapan CSR oleh perusahaan.

Berbagai penelitian terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan Muhamad Muslim Utomo (2000) melakukan penelitian pengaruh karakteristik perusahaan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan. Hasil penelitian Muhamad Muslim Utomo menunjukan bahwa *high-profile* lebih banyak pengungkapan sosialnya dalam laporan tahunan perusahaan dibanding perusahaan *low-profile*.

Yuliani (2003) secara rinci menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan tipe industri terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungannya. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa variabel ukuran perusahaan yang diproksi dengan penjualan bersih dan tipe industri berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, Sedangkan profitabilitas tidak ada pengaruhnya dengan pengungkapan tanggung jawab sosial.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Amran dan Devi (2008) diantaranya ada enam faktor yang diindikasikan mempengaruhi pengungkapan CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) di Malaysia. Faktor-faktor tersebut

diantaranya kepemilikan saham pemerintah (*government shareholding*), faktor kepemilikan saham asing (*foreign shareholding*), tipe industri (*industry type*), ukuran perusahaan (*corporate size*), dan profitabilitas (*profitability*) yang memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *CSR*.

Dari beberapa penelitian tersebut banyak keragaman hasil yang ditemukan dalam setiap penelitian. Hal ini disebabkan karena perbedaan tahun penelitian dan sampel yang digunakan oleh peneliti. Untuk itu peneliti ingin melakukan penelitian ulang dalam hal pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini replikasi dari penelitian Lovink Angel Dwi Karina yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi pengungkapan Corporate Social Responsibility”. Adapun pada penelitian ini menguji pengaruh variabel yaitu Kepemilikan Saham Pemerintah, Tipe Industri, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas. Selain itu juga perusahaan yang digunakan adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2008-2012. Sehingga penelitian ini dapat menguji kembali apakah hasilnya dapat memperkuat teori yang ada dan hasil yang lebih akurat dan konsisten.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **”Pengaruh Kepemilikan Saham Pemerintah, Tipe Industri, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* pada Perusahaan *Go Public* (Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Seauhmana kepemilikan saham pemerintah berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia?
2. Seauhmana tipe industri berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia?
3. Seauhmana ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia?
4. Seauhmana profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka penelitian ini digunakan untuk menguji :

1. Pengaruh kepemilikan saham pemerintah terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Pengaruh tipe perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
4. Pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang masalah yang diteliti serta memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial dalam perusahaan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menambah informasi pengetahuan dengan memberikan gambaran tentang tanggung jawab sosial perusahaan, serta bisa dijadikan sebagai referensi atau pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pelaku Bisnis atau Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan maupun investor, terutama sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijaksanaan sehubungan dengan penerapan *Corporate Social Responsibility* dalam operasional perusahaan dan pengungkapannya dalam laporan tahunan perusahaan.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

Teori Stakeholder

Pendekatan *stakeholder* muncul pada pertengahan tahun 1980-an. Latar belakang pendekatan *stakeholder* adalah keinginan untuk membangun suatu kerangka kerja yang responsif terhadap masalah yang dihadapi para manajer saat itu perubahan lingkungan (Freeman dan McVea 2001).

Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktifitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan stakeholder (Gray, et al 1995). Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun juga harus mampu memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007).

Tanggung jawab sosial perusahaan seharusnya melampaui tindakan memaksimalkan laba untuk kepentingan pemegang saham (*shareholder*), namun lebih luas lagi bahwa kesejahteraan yang diciptakan oleh perusahaan tidak terbatas kepada kepentingan pemegang saham, tetapi juga untuk kepentingan *stakeholder*, yaitu semua pihak yang mempunyai keterkaitan terhadap perusahaan

(Untung, 2008). Mereka adalah pemasok, pelanggan, pemerintah, masyarakat lokal, investor, karyawan, kelompok politik, dan asosiasi perdagangan. Seperti halnya pemegang saham yang mempunyai hak terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, *stakeholder* juga mempunyai hak terhadap perusahaan.

Adanya teori *stakeholder* ini memberikan landasan bahwa suatu perusahaan harus mampu memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Manfaat tersebut dapat diberikan dengan cara menerapkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Adanya program tersebut pada perusahaan diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan, pelanggan, dan masyarakat lokal. Sehingga diharapkan terjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan lingkungan sekitarnya.

Teori Agensi

Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (agensi) yaitu manajer. Jansen dan dan Meckling (1986) menyatakan hubungan keagenan adalah suatu kontrak di mana satu atau lebih orang (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan mendelegasikan sebagian kewenangan pengambilan keputusan kepada agen.

Dalam hubungan agensi terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu biaya pengawasan, biaya kontrak, dan visibilitas politis. Perusahaan yang melakukan pengungkapan informasi CSR dengan tujuan membangun image pada perusahaan dan

mendapatkan perhatian dari masyarakat. Perusahaan memerlukan biaya dalam memberikan informasi pertanggungjawaban sosial, sehingga laba yang dilaporkan dalam tahun berjalan menjadi rendah. Ketika perusahaan menghadapi biaya kontrak dan biaya pengawasan yang rendah dan visibilitas politis yang tinggi akan cenderung untuk mengungkapkan informasi sosial (Belkaoni dan Karpik, dalam Anggraini, 2006).

Berdasarkan teori agensi, perusahaan yang menghadapi biaya kontrak dan biaya pengawasan rendah cenderung akan melaporkan laba bersih rendah dengan kata lain akan mengeluarkan biaya untuk kepentingan manajemen. Kemudian sebagai wujud pertanggungjawaban, manajer sebagai agen akan berusaha memenuhi keinginan pihak prinsipal dalam hal ini adalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Teori Legitimasi

Teori legitimasi mengungkapkan bahwa perusahaan secara kontinyu berusaha untuk bertindak sesuai dengan batas dan norma dalam masyarakat. Atas usahanya tersebut perusahaan berusaha agar aktivitasnya diterima menurut persepsi pihak eksternal (Deegan, 2000).

Ghozali dan Chairiri (2007) menjelaskan bahwa teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi, karena teori legitimasi adalah hal yang paling penting bagi organisasi. Batasan-batasan yang ditekankan oleh norma dan nilai sosial serta reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan.

Adanya teori legitimasi memberikan landasan bahwa perusahaan harus menaati norma yang berlaku di masyarakat dimana perusahaan berada agar operasi perusahaan juga dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik dari masyarakat sekitar. Untuk hal tersebut, perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan cara mengembangkan program *corporate social responsibility* (CSR). Dengan adanya program CSR, perusahaan dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitar sehingga masyarakat dapat menerima dengan baik keberadaan perusahaan dilingkungannya.

B. Konsep Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

1. Definisi Tanggung Jawab Sosial (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) muncul bersifat spontanitas dan belum terkelola dengan baik. Selain itu, dorongan eksternal berupa tuntutan masyarakat dan dorongan internal perusahaan agar perusahaan lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan konsep ketika perusahaan memutuskan secara sukarela untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan lebih baik dan lingkungan yang lebih lestari (Yusuf, 2007:52).

Menurut *International Finance Corporation* CSR adalah: Komitmen dunia bisnis usaha untuk memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerja sama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk meningkatkan kehidupan mereka melalui cara-cara yang baik bagi bisnis maupun pembangunan.

Menurut Lord Holme dan Richard Watt, dalam Nor Hadi (2011) “CSR adalah komitmen berkelanjutan dari perusahaan yang berjalan secara etis dan memiliki kontribusi terhadap pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarga mereka, dan juga komunitas lokal serta masyarakat luas”.

Sementara menurut Griffin dan Ebert (2007) CSR adalah” Suatu konsep yang berhubungan namun merujuk pada seluruh cara bisnis berupaya menyeimbangkan komitmennya terhadap kelompok dan pribadi dalam lingkungan sosialnya”.

Definisi mengenai CSR secara etimologis di Indonesia kerap diterjemahkan sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Namun setelah tanggal 16 Agustus 2007, CSR di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat UU PT bahwa CSR yang dikenal dalam undang-undang ini sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

2. Pengungkapan CSR dalam Laporan Tahunan di Indonesia

Menurut Hendriksen (2002:428) dalam tuti (2006) mendefinisikan pengungkapan sebagai penyajian sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk

pengoperasian secara optimal pasar modal yang efisien. Ada pengungkapan yang bersifat wajib (*mandatory*), yaitu pengungkapan informasi wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela (*voluntary*) yang merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku.

Setiap pelaku ekonomi selain berusaha untuk kepentingan pemegang saham dan mengkonsetrasikan diri pada pencapaian laba juga mempunyai tanggung jawab sosial, dan hal itu perlu diungkapkan dalam laporan tahunan, sebagaimana dinyatakan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 2009) paragraf kedua belas:

“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan”.

Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan masyarakat secara keseluruhan (Eddy, 2005). Hasil penelitian dari beberapa negara membuktikan bahwa laporan tahunan (*annual report*) merupakan media yang tepat untuk menyampaikan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pertanggungjawaban sosial timbul jika organisasi memiliki kesadaran bahwa mereka memiliki kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap lingkungannya. Ramanathan (1976) dalam Puspitaningrum (2004) mengemukakan ada empat tujuan dari pengungkapan tanggung jawab sosial, yaitu:

- a. Mengidentifikasi dan mengukur kontribusi sosial perusahaan tiap periode, yang tidak hanya berupa internalisasi *social cost* dan *social benefit*, tetapi juga pengaruh eksternalitas tersebut terhadap kelompok sosial yang berbeda.
- b. Untuk membantu menentukan apakah strategi dan praktek perusahaan secara langsung mempengaruhi sumber daya dan status kekuatan individu, masyarakat kelompok sosial, dan generasi yang konsisten dengan prioritas sosial di satu sisi dengan aspirasi individu di pihak lain.
- c. Untuk menyediakan secara optimal informasi-informasi yang relevan dengan unsur-unsur sosial dalam tujuan, kebijakan, program, kinerja dan sumbangan perusahaan terhadap tujuan sosial.
- d. Untuk meningkatkan keunggulan budaya saing perusahaan dalam globalisasi dan/atau perdagangan bebas.

Menurut Gray et al dalam Eddy (2005) ada dua pendekatan yang secara signifikan berbeda dalam melakukan penelitian tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pertama, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan mungkin diperlakukan sebagai suplemen dari aktivitas akuntansi konvensional. Pendekatan ini secara umum akan menganggap masyarakat

keuangan sebagai pemakai utama pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan cenderung membatasi persepsi tentang tanggung jawab sosial yang dilaporkan.

Pendekatan alternatif kedua dengan meletakkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada suatu pengujian peran informasi dalam hubungan masyarakat dan organisasi. Pandangan lebih luas ini telah menjadi sumber utama kemajuan dalam pemahaman tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan sekaligus menjadi sumber kritik yang utama terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Praktek pengungkapan informasi CSR bervariasi di antar waktu dan antar negara. Hal ini disebabkan isu-isu yang dipandang penting oleh suatu negara mungkin akan menjadi kurang penting oleh suatu negara lain. Pengungkapan CSR perusahaan akan meningkatkan citra perusahaan dan ingin dilihat sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan perusahaan akan mengungkapkan informasi tertentu jika ada aturan yang menghendakinya (Retno, 2006).

3. Manfaat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Menurut Yusuf (2007:71) ada tiga alasan mengapa perusahaan mesti merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab sosial perusahaan sejalan dengan operasi usahanya yaitu:

1. Perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat.
2. Kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme.

3. Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial.

Dengan lebih banyak memberikan perhatian kepada lingkungan sekitar, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha-usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas kehidupan manusia dalam jangka panjang. Perhatian terhadap masyarakat, dapat dilakukan dengan cara melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan yang dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki diberbagai bidang. Dengan menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan yang dijalankannya, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun juga turut berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang.

Menurut Susanto (2007:28) dari sisi perusahaan terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari aktivitas CSR yaitu:

1. Mengurangi resiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan.
2. CSR dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis.
3. Keterlibatan dan kebanggaan karyawan.
4. CSR yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan para *stakeholdersnya*.
5. Meningkatkan penjualan.
6. Insentif-insentif lainnya seperti insentif pajak dan berbagai perlakuan khusus lainnya.

4. Penilaian Corporate Social Responsibility

Penilaian terhadap CSR bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, peluang, tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan aktivitas CSR. Penilaian yang tepat harus memberikan pemahaman mengenai hal-hal:

1. Nilai-nilai dan etika perusahaan
2. Dorongan eksternal dan internal yang memotivasi perusahaan untuk menjalankan aktivitas CSR.
3. Isu-isu penting seputar CSR yang dapat memberikan dampak bagi perusahaan.
4. *Stakeholder-stakeholder* kunci.
5. Struktur pengambilan keputusan yang berlaku dalam perusahaan saat ini, kekuatan dan kelemahannya dalam hal mengimplementasikan program-program CSR yang terintegrasi.
6. Implikasi terhadap sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki.
7. Aktivitas-aktivitas berkaitan dengan CSR yang tengah berjalan.

Penilaian bertujuan agar perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas CSR secara berkesinambungan, tidak bersifat parsial. Penilaian CSR juga membantu perusahaan mengidentifikasi kesenjangan dan peluang yang ada, sehingga mampu memperbaiki kualitas pengambilan keputusan.

GRI adalah lembaga independen yang bergabung dengan persatuan program lingkungan. Item pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui tingkat tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Item – Item Pengungkapan

Indikator Kinerja Ekonomi	
Aspek: Kinerja Ekonomi	
EC 1	Perolehan dan distribusi nilai ekonomi langsung, meliputi pendapatan, biaya operasi, imbal jasa karyawan, donasi, dan investasi komunitas lainnya, laba ditahan, dan pembayaran kepada penyandang dana serta pemerintah.
EC 2	Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta peluangnya bagi aktivitas organisasi.
EC 3	Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan pasti.
EC 4	Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah.
Aspek: Kehadiran Pasar	
EC 5	Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan upah minimum setempat pada lokasi operasi yang signifikan.
EC 6	Kebijakan, praktek, dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada lokasi operasi yang signifikan.
EC 7	Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen senior lokal yang dipekerjakan pada lokasi operasi yang signifikan.
Aspek: Dampak Ekonomi Tidak Langsung	
EC 8	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur serta jasa yang diberikan untuk kepentingan publik secara komersial, natura.
EC 9	Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk seberapa luas dampaknya.
Indikator Kinerja Lingkungan	
Aspek: Material	
EN 1	Penggunaan Bahan; diperinci berdasarkan berat atau volume.
EN 2	Persentase penggunaan bahan daur ulang.
Aspek: Energi	
EN 3	Penggunaan energi langsung dari sumberdaya energi primer.
EN 4	Pemakaian energi tidak langsung berdasarkan sumber primer.
EN 5	Penghematan energi melalui konservasi dan peningkatan efisiensi.
EN 6	Inisiatif mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energi yang dapat diperbarui, serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut.
EN 7	Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan pengurangan yang dicapai.
Aspek: Air	
EN 8	Total pengambilan air per sumber.
EN 9	Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air.
EN 10	Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan didaur ulang.
Aspek: Keanekaragaman Hayati	
EN 11	Lokasi dan ukuran tanah yang dimiliki, disewa, dikelola oleh organisasi pelapor yang berlokasi di dalam, atau yang berdekatan dengan daerah yang diproteksi (dilindungi) atau daerah-daerah yang

	memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi
EN 12	Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, produk, dan jasa organisasi pelapor terhadap keanekaragaman hayati di daerah yang diproteksi (dilindungi) dan di daerah yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang diproteksi (dilindungi)
EN 13	Perlindungan dan pemulihan habitat
EN 14	Strategi, tindakan, dan rencana mendatang untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati
EN 15	Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan yang masuk dalam daftar merah IUCN (<i>Red List Species</i>) dan yang masuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di daerah-daerah yang terkena dampak operasi.
Aspek: Emisi, Efluen dan Limbah	
EN 16	Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung maupun tidak langsung dirinci berdasarkan berat.
EN 17	Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci berdasarkan berat.
EN 18	Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencapaiannya.
EN 19	Emisi bahan kimia yang merusak lapisan ozon (ozone depleting substances/ODS) diperinci berdasarkan berat.
EN 20	NO _x , SO _x dan emisi udara signifikan lainnya yang diperinci berdasarkan jenis dan berat.
EN 21	Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan.
EN 22	Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode pembuangan.
EN 23	Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan
EN 24	Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah yang dianggap berbahaya menurut Lampiran Konvensi Basel I, II, III dan VIII, dan persentase limbah yang diangkut secara internasional.
EN 25	Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai keanekaragaman hayati badan air serta habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan dan limpasan air organisasi pelapor.
Aspek: Produk dan Jasa	
EN 26	Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa dan sejauh mana dampak pengurangan tersebut.
EN27	Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik menurut kategori.
Aspek: Kepatuhan	
EN 28	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah sanksi non-moneter atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan.
Aspek: Pengangkutan/Transportasi	
EN 29	Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta material yang digunakan untuk operasi perusahaan & tenaga kerja yang memindahkan.
Aspek: Menyeluruh	
EN 30	Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan.
Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak	

Aspek: Pekerjaan	
LA 1	Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan, dan wilayah.
LA 2	Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah.
LA 3	Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (purna waktu) yang tidak disediakan bagi karyawan tidak tetap (paruh waktu) menurut kegiatan pokoknya.
Aspek: Tenaga kerja / Hubungan Manajemen	
LA 4	Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar menawar kolektif tersebut.
LA 5	Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan kegiatan penting, termasuk apakah hal itu dijelaskan dalam perjanjian kolektif tersebut.
Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Jabatan	
LA 6	Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam panitia kesehatan dan keselamatan antara manajemen dan pekerja yang membantu memantau dan memberi nasihat untuk program keselamatan dan kesehatan jabatan.
LA 7	Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang hilang, dan ketidakhadiran, dan jumlah kematian karena pekerjaan menurut wilayah.
LA 8	Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/bimbingan, pencegahan, pengendalian risiko setempat untuk membantu para karyawan, anggota keluarga dan anggota masyarakat, mengenai penyakit berat/berbahaya.
LA 9	Masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat karyawan.
Aspek: Pelatihan dan Pendidikan	
LA 10	Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan menurut kategori/kelompok karyawan.
LA 11	Program untuk pengaturan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat yang menunjang kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu mereka dalam mengatur akhir karier.
LA 12	Persentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan pengembangan karier secara teratur.
Aspek: Keberagaman dan Kesempatan Setara	
LA 13	Komposisi badan pengelola/penguasa dan perincian karyawan tiap kategori/kelompok menurut jenis kelamin, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan keanekaragaman indikator lain.
LA 14	Perbandingan/rasio gaji dasar pria terhadap wanita menurut kelompok/kategori karyawan.
Hak Asasi Manusia	
Aspek : Praktek Investasi dan Pengadaan	
HR 1	Persentase dan jumlah perjanjian investasi signifikan yang memuat klausul HAM atau telah menjalani proses skrining/ filtrasi terkait dengan aspek hak asasi manusia.
HR 2	Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang telah menjalani

	proses skrining/ filtrasi atas aspek HAM
HR 3	Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan dalam hal mengenai kebijakan dan serta prosedur terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi, termasuk persentase karyawan yang telah menjalani pelatihan.
Aspek: Nondiskriminasi	
HR 4	Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang diambil/dilakukan.
Aspek: Kebebasan Berserikat dan Berunding Bersama Berkumpul	
HR 5	Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang diteridentifikasi dapat menimbulkan risiko yang signifikan serta tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.
Aspek: Pekerja Anak	
HR 6	Kegiatan yang identifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan terjadinya kasus pekerja anak, dan langkah-langkah yang diambil untuk mendukung upaya penghapusan pekerja anak.
Aspek: Kerja Paksa dan Kerja Wajib	
HR 7	Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan kasus kerja paksa atau kerja wajib, dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mendukung upaya penghapusan kerja paksa atau kerja wajib.
Aspek: Praktek/Tindakan Pengamanan	
HR 8	Persentase personel penjaga keamanan yang terlatih dalam hal kebijakan dan prosedur organisasi terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi.
Aspek: Hak Penduduk Asli	
HR 9	Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli dan langkah-langkah yang diambil.
Masyarakat/ Sosial	
Aspek: Komunitas	
SO 1	Sifat dasar, ruang lingkup, dan keefektifan setiap program dan praktek yang dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, baik pada saat memulai, pada saat beroperasi, dan pada saat mengakhiri.
Aspek: Korupsi	
SO 2	Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko terhadap korupsi.
SO 3	Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur antikorupsi
SO 4	Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi.
Aspek: Kebijakan Publik	
SO 5	Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses melobi dan pembuatan kebijakan publik.
SO 6	Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik, politisi, dan institusi terkait berdasarkan negara di mana perusahaan beroperasi.
Aspek: Kelakuan Tidak Bersaing	
SO 7	Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan anti persaingan, <i>antitrust</i> , dan praktek monopoli serta sanksinya.

Aspek: Kepatuhan	
SO 8	Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi non-moneter untuk pelanggaran hukum dan peraturan yang dilakukan.
Tanggung Jawab Produk	
Aspek: Kesehatan dan Keamanan Pelanggan	
PR 1	Tahapan daur hidup di mana dampak produk dan jasa yang menyangkut kesehatan dan keamanan dinilai untuk penyempurnaan, dan persentase dari kategori produk dan jasa yang penting yang harus mengikuti prosedur tersebut.
PR 2	Jumlah pelanggaran terhadap peraturan dan etika mengenai dampak kesehatan dan keselamatan suatu produk dan jasa selama daur hidup, per produk.
Aspek: Pemasangan Label bagi Produk dan Jasa	
PR 3	Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur dan persentase produk dan jasa yang signifikan yang terkait dengan informasi yang dipersyaratkan tersebut.
PR 4	Jumlah pelanggaran peraturan dan <i>voluntary codes</i> mengenai penyediaan informasi produk dan jasa serta pemberian label.
PR 5	Praktek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk hasil survei yang mengukur kepuasan pelanggan.
Aspek: Komunikasi Pemasaran	
PR 6	Program-program untuk ketaatan pada hukum, standar dan <i>voluntary codes</i> yang terkait dengan komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, promosi, dan <i>sponsorship</i> .
PR 7	Jumlah pelanggaran peraturan dan <i>voluntary codes</i> sukarela mengenai komunikasi pemasaran termasuk periklanan, promosi, dan <i>sponsorship</i> , menurut produknya.
Aspek: Keleluasaan Pribadi (<i>privacy</i>) Pelanggan	
PR 8	Jumlah keseluruhan dari pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran keleluasaan pribadi (<i>privacy</i>) pelanggan dan hilangnya data pelanggan.
Aspek: Kepatuhan	
PR 9	Nilai moneter dari denda pelanggaran hukum dan peraturan mengenai pengadaan dan penggunaan produk dan jasa

5. Kepemilikan saham pemerintah (*Government Shareholding*)

Kepemilikan saham pemerintah (*government shareholding*) adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Melalui kepemilikan saham ini pemerintah berhak menetapkan direktur perusahaan. Selain itu pemerintah dapat mengendalikan kebijakan yang diambil oleh manajemen agar sesuai dengan

kepentingan/aspirasi pemerintah. Untuk dapat bertahan, perusahaan ini harus dapat mensinkronkan dirinya dengan pemerintah. (Amran dan Devi, 2008).

Di Indonesia suatu perusahaan dapat disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) apabila mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah sehingga *stakeholder* utama perusahaan ini adalah pemerintah. Dalam menjalankan operasional perusahaannya, BUMN berpedoman kepada perundang-undangan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu BUMN akan mendapatkan sorotan yang lebih oleh masyarakat, hal ini karena masyarakat memiliki ekspektasi yang lebih besar terhadap BUMN dari pada perusahaan swasta. Bagi masyarakat, pengelolaan BUMN yang baik mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam berbisnis dan dalam pelaksanaan *good corporate governance*.

Berdasarkan penjelesan diatas dapat diartikan tekanan pemerintah dan publik memiliki pengaruh terhadap pengelolaan perusahaan termasuk dalam pelaksanaan CSR, akan tetapi penelitian yang dilakukan Noviyanti (2009) menemukan hasil bahwa hanya tekanan publiklah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan CSR.

6. Tipe Industri (Industry Type)

Tipe industri terdiri atas dua jenis, yaitu industri yang *high-profile* dan industri yang *low-profile*. Robert (1992) dalam Anggraini (2006) menggambarkan industri yang *high-profile* sebagai perusahaan yang mempunyai tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap lingkungan (*consumer visibility*), tingkat risiko politik yang tinggi atau tingkat kompetisi yang ketat. Keadaan tersebut membuat perusahaan menjadi lebih mendapatkan sorotan oleh masyarakat luas mengenai aktivitas

perusahaannya. Industri *low-profile* adalah kebalikannya, perusahaan ini memiliki tingkat *consumer visibility*, tingkat risiko politik, dan tingkat kompetisi yang rendah, sehingga tidak terlalu mendapat sorotan dari masyarakat luas mengenai aktivitas perusahaannya meskipun dalam melakukan aktivitasnya tersebut perusahaan melakukan kesalahan atau kegagalan pada proses maupun hasil produksinya.

Klasifikasi tipe industri yang diuraikan oleh banyak peneliti terdahulu sifatnya sangat subyektif dan berbeda-beda. Roberts (1992) dalam Hackston dan Milne (1996) mengelompokkan perusahaan otomotif, penerbangan dan minyak sebagai industri yang *high-profile*, sedangkan Diekers dan Perston (1977) dalam Hackston dan Milne (1996) mengatakan bahwa industri ekstraktif merupakan industri yang *high-profile*. Patten (1991) dalam Hackston dan Milne (1996) mengelompokkan industri pertambangan, kimia, dan kehutanan sebagai industri *high-profile*. Atas dasar pengelompokan di atas, maka penelitian ini mengelompokkan industri migas, kehutanan, pertanian, pertambangan, perikanan, kimia, otomotif, transportasi, telekomunikasi, barang konsumsi, makanan dan minuman, kertas, farmasi, plastik, dan konstruksi sebagai industri yang *high-profile*.

7. Ukuran Perusahaan (Corporate Size)

Ukuran perusahaan merupakan variabel independen yang banyak digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Secara umum ukuran dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Jika pengertian tersebut dihubungkan dengan

perusahaan atau organisasi maka ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai besar atau luasnya perusahaan atau organisasi.

Menurut Mas'ud (1998) ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara antara lain total aktiva, *long size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam dua kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*).

Ukuran perusahaan dijadikan proksi ketidakpastian, karena perusahaan yang berskala besar umumnya lebih dikenal oleh masyarakat daripada perusahaan yang berskala kecil. Karena lebih dikenal masyarakat maka informasi mengenai perusahaan lebih besar lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan berskala kecil sehingga ketidakpastian akan masa depan perusahaan akan bisa diketahui.

Perusahaan besar merupakan entitas bisnis yang banyak disoroti, pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial. Akan tetapi, tidak semua penelitian mendukung hubungan antara *size* perusahaan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian yang tidak berhasil menunjukkan hubungan kedua variabel ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Robert (1992) dalam Sembiring (2005), sedangkan penelitian yang berhasil menunjukkan hubungan kedua variabel ini antara lain Hackston dan Milne (1996), Hasibuan (2001), Anggraini (2006), Amran dan Devi (2008), Sembiring (2005).

8. Profitabilitas (Profitability)

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Menurut Heinze (1976); Gray, *et al.* (1995); dalam Sembiring (2005) profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan CSR kepada pemegang saham. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosialnya. Hackston dan Milne (1996) dalam penelitiannya menemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat profitabilitas dengan pengungkapan informasi sosial.

Dengan demikian pengukuran profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan tingkat efektifitas manajemen secara menyeluruh dan secara tidak langsung. Para investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis ini. Selain itu keuntungan (profitabilitas) sangat penting bagi perusahaan bukan saja untuk terus mempertahankan pertumbuhan bisnisnya namun juga memperkuat kondisi keuangan perusahaan.

Hubungan antara kinerja keuangan suatu perusahaan dalam hal ini profitabilitas, dengan pengungkapan tanggung jawab sosial menurut Belkaoui dan Karpik (1989) paling baik diekspresikan dengan pandangan bahwa tanggapan sosial yang diminta dari manajemen sama dengan kemampuan yang diminta untuk membuat suatu perusahaan memperoleh laba. Manajemen yang sadar dan memperhatikan masalah sosial juga akan memajukan kemampuan yang diperlukan untuk menggerakkan kinerja keuangan perusahaan. Konsekuensinya,

perusahaan yang mempunyai respon sosial dalam hubungannya dengan pengungkapan tanggung jawab sosial seharusnya menyingkirkan seseorang yang tidak merespon hubungan antara profitabilitas perusahaan dengan variabel akuntansi seperti tingkat pengembalian investasi dan variabel pasar seperti *differential return* harga saham.

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan.

Penelitian mengenai *Corporate Social Responsibility* telah banyak dilakukan di berbagai negara dan dalam kurun waktu yang berbeda. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian ini, yaitu:

Tabel 2
Daftar Penelitian Terdahulu

Penelitian (tahun)	Alat analisis	Judul penelitian	Hasil penelitian
Anggaraini (2006)	Regresi berganda	Pengaruh kepemilikan manajemen, leverage, ukuran perusahaan, tipe industri, profitabilitas terhadap CSR disclosure.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran perusahaan dan tipe industri berpengaruh sig dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan csr.
Marzully (2012)	Regresi Berganda	Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi penungkapan CSR.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, tidak berpengaruh terhadap sig dan Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Risky Fransiska	Regresi Berganda (<i>Multiple Regression</i>)	Analisis Faktor yang mempengaruhi pengungkapan csr.	Profitabilitas berpengaruh sig terhadap pengungkapan csr, dan tipe industri tidak berpengaruh terhadap pengungkapan csr.
Amran dan Devi (2008)	Regresi Berganda (<i>Multiple Regression</i>)	The Impact of government and foreign affiliate influence on corporate social reporting.	Kepemilikan saham pemerintah berpengaruh sign terhadap pengungkapan csr.
Sembiring (2005)	Regresi Berganda (<i>Multiple Regression</i>)	Karakteristik perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial.	<i>Size, profile</i> , dan ukuran ditemukan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
Lovink Angel Dwi Karina (2013)	Regresi Berganda (<i>Multiple Regression</i>)	Analisis faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR.	Kepemilikan saham pemerintah dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan csr, tipe industri, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap csr.
Ahmad Kamil (2012)	Regresi Berganda	Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap luas pengungkapan CSR	Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan csr, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap csr.

Wirmie Eka Putra (2011)	Regresi Berganda	Pengaruh size, profitabilitas, leverage, Kepemilikan dalam negeri dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan	Kelima variabel independen tersebut berpengaruh sig positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.
-------------------------	------------------	--	--

Sumber: Kumpulan berbagai jurnal.

D. Pengembangan Hipotesis

1) Hubungan Kepemilikan Saham Pemerintah terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial.

Kepemilikan saham oleh pemerintah menyebabkan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya harus selaras dengan kepentingan pemerintah. Pemerintah berhak menunjuk direktur perusahaan tersebut sehingga keputusan bisnis yang diambil merupakan kepanjangan tangan dari kepentingan pemerintah (Amran dan Devi (2008) dalam Iovink 2012). Perusahaan akan mendapatkan sorotan yang lebih besar oleh masyarakat, karena masyarakat memiliki ekspektasi yang lebih besar terhadap BUMN dari pada perusahaan swasta. Bagi masyarakat, pengelolaan BUMN yang baik mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam berbisnis dan dalam pelaksanaan *good corporate governance*.

Tekanan atas sorotan masyarakat itulah yang membuat pemerintah lebih transparan lagi dalam pengelolaannya. Sebagaimana diatur dalam UU PT No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa pengungkapan yang lebih besar merupakan wujud dari akuntabilitas atas pengelolaan perusahaan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya tekanan atas sorotan masyarakat membuat pemerintah lebih transparan dalam pengelolaannya.

Seperti kita ketahui bahwa perusahaan BUMN banyak mendapat sorotan dari masyarakat sehingga pengelolaan BUMN akan mencerminkan keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintah. Pemerintah dapat mengendalikan kebijakan yang diambil manajemen agar sesuai dengan kepentingan pemerintah. Oleh sebab itu perusahaan dapat mensinkronkan dirinya agar mampu bertahan.

Intervensi Pemerintah dalam kepemilikan di Perusahaan dapat memberi tekanan kepada perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi, karena pemerintah merupakan badan yang dipercaya oleh rakyat. Pemerintah yang juga bertindak sebagai regulator, apabila memiliki proporsi saham pada sebuah perusahaan, maka pemerintah memiliki kekuatan untuk menekan perusahaan mematuhi peraturan pemerintah mengenai CSR..

H_1 : Kepemilikan saham Pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

2) Hubungan Tipe Industri terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Tipe industri adalah karakteristik yang dimiliki oleh perusahaan yang berkaitan dengan bidang usaha, risiko usaha, karyawan yang dimiliki dan lingkungan perusahaan. Tipe industri didefinisikan sebagai faktor potensial yang mempengaruhi praktek pengungkapan sosial perusahaan. Robert (1992) menyatakan ada 2 tipe industri, yaitu industri yang *high-profile* dan industri yang *low-profile*. Robert (1992) dalam Hackston and Milne (1996) mendefinisikan Perusahaan yang termasuk dalam tipe industri *high-profile* adalah perusahaan yang mempunyai tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap lingkungan, tingkat

resiko politik yang tinggi atau tingkat kompetensi yang ketat. Perusahaan-perusahaan *high-profile*, pada umumnya merupakan perusahaan yang memperoleh sorotan dari masyarakat karena aktivitas operasinya memiliki potensi untuk bersinggungan dengan kepentingan luas. Masyarakat umumnya lebih sensitif terhadap industri tipe ini karena kelalaian perusahaan dalam pengamanan proses produksi dan hasil produksi dapat membawa akibat yang fatal. Contoh perusahaan yang termasuk dalam kelompok industri *high-profile* antara lain perusahaan perminyakan dan pertambangan, kimia, hutan, kertas, otomotif, penerbangan, agribisnis, tembakau dan rokok, produk makanan dan minuman, media dan komunikasi, energi (listrik), *engineering*, kesehatan serta transportasi dan pariwisata.

Sementara Perusahaan *low-profile* adalah perusahaan yang tidak terlalu memperoleh sorotan luas dari masyarakat saat operasi yang mereka lakukan mengalami kegagalan atau kesalahan pada aspek tertentu dalam proses atau hasil produksinya. Jika dibandingkan dengan perusahaan *high-profile*, perusahaan yang termasuk dalam kategori *low-profile* lebih ditoleransi oleh masyarakat luas disaat perusahaan melakukan kesalahan. Adapun perusahaan yang termasuk dalam kelompok industri *low-profile* antara lain perusahaan bangunan, keuangan, perbankan, *supplier* peralatan medis, *property*, produk tekstil, produk personal dan produk rumah tangga.

Sifat dari industri suatu perusahaan telah diidentifikasi sebagai faktor yang potensial menentukan praktek pengungkapan biaya sosial perusahaan. Dierkes dan Preston (1977) dalam Hackston dan Milne (1996) berpendapat bahwa perusahaan

yang aktivitas ekonominya mengolah lingkungan, lebih cenderung mengungkapkan informasi tentang pengaruh aktivitasnya terhadap lingkungan dari pada industri lainnya. Sementara itu perusahaan yang berorientasi pelanggan dapat diharapkan untuk menunjukkan perhatian yang lebih besar dengan mengungkapkan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat, untuk meningkatkan *image* perusahaan dan pengaruh pada penjualan.

H₂ : Tipe industri berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

3) Hubungan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Ukuran perusahaan (*size*) perusahaan merupakan variabel penduga yang banyak digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini dikaitkan dengan teori agensi, dimana perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan tersebut. Di samping itu perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti, pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan (Sembiring, 2005).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005), secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan, dan perusahaan yang lebih besar dengan aktivitas operasi dan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat mungkin akan memiliki pemegang saham yang memperhatikan program sosial

yang dibuat perusahaan sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin luas.

Machfoed (1998) ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara antara lain total aktiva, *long size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam dua kategori yaitu: perusahaan besar (*large firm*), perusahaan kecil (*small firm*). Ukuran perusahaan merupakan faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial, karena perusahaan besar lebih mempunyai potensi memberikan kontribusi ketimbang perusahaan kecil.

Pelaksanaan CSR seringkali diselenggarakan dengan jumlah biaya yang tidak sedikit, maka CSR identik dengan perusahaan besar yang ternama. Dengan kekuatan sumber daya yang dimilikinya, perusahaan besar ternama ini mampu membentuk opini publik yang mengesankan seolah-olah mereka telah melaksanakan CSR, bahkan boleh jadi dilakukan untuk menutupi perilaku-perilaku yang tidak etis serta perbuatan melanggar hukum.

Dapat disimpulkan bahwa identiknya CSR dengan perusahaan besar dan ternama membawa implikasi lain. Bila perusahaan besar dan ternama yang melakukan perbuatan tidak etis atau melanggar hukum, maka sorotan tajam publik akan mengarah kepada mereka. Namun bila perusahaan kecil atau menengah yang melakukannya, maka publik cenderung tidak peduli, ataupun kalau menaruh perhatian tidak sebesar perusahaan besar yang ternama. Padahal perilaku-perilaku yang tidak etis serta melanggar hukum yang dilakukan oleh siapapun tidak dapat diterima.

Meskipun kebanyakan pelaku program CSR merupakan perusahaan besar, tapi sebenarnya CSR bukan hanya menjadi tanggung jawab mereka. Perusahaan kecil menengahpun memiliki tanggung jawab serupa, karena yang merusak lingkungan bukan hanya perusahaan besar tapi juga melibatkan perusahaan menengah dan kecil.

Selain itu penelitian yang menunjukkan hubungan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah Cowen *et al* (1987) dalam Yuningsih (2003) mengungkapkan bahwa perusahaan yang lebih besar melakukan aktivitas yang lebih banyak, menyebabkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan, memiliki lebih banyak pemegang saham yang mungkin berkepentingan dengan program sosial perusahaan, dan laporan keuangannya menyediakan alat yang efisien dalam mengkomunikasikan informasi sosial perusahaan.

Dari sisi tenaga kerja, dengan semakin banyaknya jumlah tenaga kerja dalam suatu perusahaan, maka tekanan pada pihak manajemen untuk memperhatikan kepentingan tenaga kerja akan semakin besar. Program berkaitan dengan tenaga kerja yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, akan semakin banyak dilakukan oleh perusahaan. Hal ini berarti program tanggung jawab sosial perusahaan juga semakin banyak dan akan diungkapkan dalam laporan tahunan. Oleh karena itu perusahaan yang lebih besar lebih dituntut untuk memperlihatkan atau mengungkapkan tanggung jawab sosialnya.

H₃ : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

4) Hubungan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Keterkaitan antara profitabilitas dengan tanggung jawab sosial sangatlah erat. Menurut Solihin (2009), kemampuan perusahaan untuk melakukan respon terhadap tekanan sosial sangat berhubungan erat dengan kesehatan keuangan perusahaan. Demikian juga jika perusahaan terlibat dalam kegiatan CSR sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan tersebut. Perusahaan yang tidak mendapatkan aliran dana masuk yang cukup dari penghasilan perusahaan tidak akan memiliki modal yang memadai untuk melaksanakan aktivitas CSR. Carroll dalam Solihin (2009) juga menyatakan agar bertanggung jawab secara sosial. Maka hal ini berarti bahwa kemampuan laba dan kepatuhan terhadap hukum merupakan dua syarat utama bagi diskusi mengenai etika perusahaan dan sampai sejauhmana perusahaan mendukung masyarakat dimana perusahaan beroperasi melalui kontribusi dalam bentuk uang, waktu, dan keahlian pegawai.

Secara teoritis, menurut Kokubu et.al (2001) dalam Sembiring (2005) terdapat hubungan positif antara kinerja ekonomi suatu perusahaan dengan pengungkapan CSR. Hal ini dikaitkan dengan teori agensi bahwa peolehan laba yang semakin besar akan membuat perusahaan mengungkapkan informasi sosial yang lebih luas.

Heinze (1976) dalam Sembiring (2005) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada

manajemen untuk melakukan dan mengungkapkan kepada pemegang saham program tanggung jawab sosial secara lebih luas. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi CSRnya.

Ketidakkonsistenan mengenai hubungan antara profitabilitas dengan pengungkapan CSR juga terjadi yakni yang diteliti oleh Sembiring (2005) dan Anggraini (2006) yang tidak menemukan hubungan antara profitabilitas dengan pengungkapan CSR. Demikian juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosmasita (2007) tidak menemukan pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan Sitepu dan Siregar (2008) menemukan hubungan antara profitabilitas dengan pengungkapan CSR.

H₄ : Profitabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

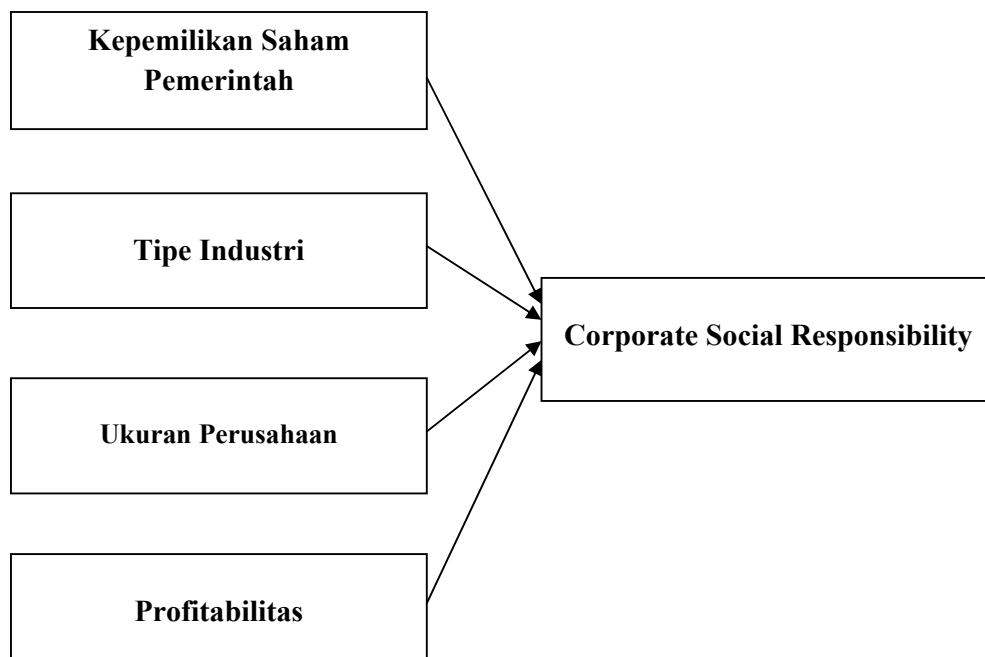
E. Kerangka Konseptual

Pada beberapa tahun belakangan ini berkembang pesat suatu konsep dalam aktivitas perusahaan. Konsep tersebut merupakan suatu tanggung jawab sosial perusahaan yang merupakan penyampaian informasi atas kontribusi perusahaan terhadap lingkungan sosialnya. Perusahaan adalah organisasi yang berdiri ditengah masyarakat untuk itu segala kegiatan yang dilakukan perusahaan juga akan dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Kegiatan-kegiatan tersebut akhirnya menjadi agenda rutin bagi aktivitas perusahaan. Untuk itu perlu diadakan pelaporan mengenai aktivitas sosial perusahaan (CSR) tersebut, salah satunya di dalam laporan tahunan perusahaan.

Sebagai mana dinyatakan dalam PSAK no 1 (revisi 2009) paragraf kedua belas, mengenai laporan tambahan lingkungan hidup dan laporan nilai tambah pada laporan tahunan perusahaan. Banyak faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk mengungkapkan CSR kedalam laporan tahunan perusahaan. Berdasarkan tinjauan pustaka serta beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti mengindikasikan faktor kepemilikan saham pemerintah, tipe industri, ukuran perusahaan, serta profitabilitas sebagai variabel independen penelitian yang mempengaruhi pengungkapan CSR sebagai variabel dependen penelitian.

Berdasarkan permasalahan penelitian yang didukung oleh landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu, maka kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Konseptual

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun hasil dari penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kepemilikan Saham Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Artinya bahwa besar kecilnya tingkat persentase kepemilikan saham pemerintah, tidak mempengaruhi luas atau tidaknya pengungkapan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Tipe Industri berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Artinya bahwa perusahaan-perusahaan yang *high-profile* dan *low-profile* berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan.
3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Artinya bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan tidak akan mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Besar atau kecilnya ukuran perusahaan tidak dapat mengungkit keputusan perusahaan dalam melakukan pengungkapan laporan pertanggungjawaban sosial yang baik.
4. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dikaitkan dengan teori agensi dengan

premis bahwa perolehan laba yang semakin besar akan membuat perusahaan mengungkapkan informasi sosial yang lebih luas.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan terdapatnya unsur subjektivitas dalam menentukan indeks pengungkapan. Hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan baku yang dapat dijadikan acuan, sehingga penentuan indeks untuk indikator GRI dalam kategori yang sama dapat berbeda untuk setiap peneliti.
2. Masing-masing jenis industri perusahaan harus ditetapkan standar yang jelas dalam mengukur tingkat pengungkapan CSR nya, karena antara perusahaan perbankan dibandingkan dengan perusahaan pertambangan akan berbeda dalam pengungkapan CSR.
3. Jumlah sampel yang terbatas hanya 26 perusahaan karena sulitnya mendapatkan annual report secara lengkap dari tahun 2008-2012.
4. Nilai adjusted *R-Square* yang rendah hanya 9,2 % hal ini menunjukkan bahwa masih banyak variabel lain yang belum digunakan dan memiliki kontribusi yang besar dalam mempengaruhi pengungkapan CSR seperti kinerja lingkungan, kepemilikan saham institusional, reaksi investor dan risiko legitimasi.

C. Saran

1. Bagi perusahaan sebaiknya melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada annual report perusahaannya lebih detail dan lebih luas.

2. Pemerintah harus menetapkan regulasi secara tegas dan jelas mengatur mengenai praktik dan pengungkapan, pengawasan CSR pada perusahaan di Indonesia serta sanksi yang diberikan apabila perusahaan tidak melaksanakan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Bagi investor yang membutuhkan informasi dari laporan keuangan maupun non keuangan perusahaan sebaiknya harus memperhatikan faktor-faktor penting yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan.
4. Peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti judul yang sama sebaiknya mempertimbangkan dan mencari variabel independen lain yang berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.